

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Revitalisasi Trotoar 103,74 Km

DPRD Minta Dinas Bina Marga Harus Punya Rencana Induk

JAKARTA – Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan merevitalisasi trotoar bagi pejalan kaki sepanjang 103,74 km di lima wilayah dengan anggaran Rp1,1 triliun.

Program tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho mengatakan, anggaran tersebut cukup tinggi karena semua trotoar yang ditata akan terintegrasi ke transportasi publik.

“Penataan trotoar yang kita lakukan sekarang dan ke depan adalah bagaimana menjadikan trotoar sebagai akses warga Jakarta dapat menjangkau transportasi publik, seperti MRT, LRT, dan BRT,” kata Harri.

Menurut dia, usulan tersebut sempat dibahas dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi D pada pertemuan perdana mereka membahas rancangan (KUA-PPAS), Rabu (30/10) lalu. Ada enam skala prioritas dalam penataan trotoar pada 2020, yaitu kawasan sekitar terminal bus, kawasan sekitar stasiun kereta api seperti MRT, LRT, dan KRL, kawasan sekitar halte Transjakarta, kawasan komersial dan perkantoran, kawasan destinasi wisata, dan kawasan permukiman menuju transportasi umum.

“Kita petakan *roadmap* -nya, lalu kita membangun. Artinya, pada saat 2018-2020, kita sudah mempunyai konsep desain membangun trotoar, dan harus skala prioritas yang akan kita bantu,” ujarnya.

Harri mencontohkan, pada 2020 akan dibangun penataan trotoar di Stasiun MRT Lebak Bulus, Cipete, dan lanjut hingga Stasiun Kota. Selain itu, juga akan dibangun trotoar di Jalan MT Haryono, karena nanti di kawasan ini ada Stasiun LRT Cawang.

Kemudian akan dilakukan penataan trotoar di kawasan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, kawasan Kuningan, tepatnya di GOR Soemantri Brodjonogoro. Selanjutnya di Jalan Pemuda, karena ada stasiun LRT, kawasan Tebet, Grogol, dan di Jakarta Utara karena ada Stasiun Jakarta Kota.

“Artinya, mengintegrasikan. Pejalan kaki dimudahkan dalam menuju ke transportasi umum. Jadi, trotoar tadi mengintegrasikan MRT, LRT, BRT maupun KRL. Jadi selain kita bangun di arterinya, kita juga akan bangun trotoar di jalan konektornya. Dan akan menggombinasikannya dengan jalur sepeda,” jelasnya.

Harri mengatakan, rencana penataan trotoar pada 2020 sepanjang 103,74 km sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022, yakni Dinas Bina Marga DKI diamanatkan melakukan penataan trotoar sepanjang 60 km selama lima tahun. “Ini sudah melampaui target dari RPJMD. Dan ke depan, kita mau naikkan

target. Tidak lagi 60 km per tahun, tetapi 100 km per tahun,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan Dinas Bina Marga dinilai belum memiliki rencana induk penataan trotoar. Menurut dia, rencana tersebut sangat penting agar anggaran yang diusulkan tepat sasaran. Jangan sampai trotoar yang sudah ditata tidak nyaman bagi pejalan kaki dan tidak terintegrasi dengan moda transportasi umum.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan banyaknya trotoar yang sudah ditata kembali dibongkar karena ada perbaikan utilitas dan saluran air yang tersumbat. Dikatakannya, meski ada *manhole* (lubang perbaikan saluran bawah trotoar), penataan trotoar tidak maksimal.

“Penataan trotoar itu harusnya terintegrasi dengan *ducting*, turunkin semua utilitas ke dalam bawah trotoar dan pindahkan ke *ducting* sehingga tidak mengganggu lebar saluran air. Kalau ada rencana induk, ya tidak akan seperti itu,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif menyatakan kemungkinan akan memangkas anggaran trotoar tersebut. Dia menduga Dinas Bina Marga memang tidak memiliki rencana induk penataan trotoar. Hal itu terlihat dari tidak adanya penjelasan perbaikan trotoar yang tambal-sulam akibat penggalan utilitas ataupun saluran.

“Kalau ada rencana induk, dia pasti dapat menjelaskan jadwal perbaikan dan kondisi trotoar

yang saling terintegrasi. Kita tunggu mereka (Dinas Bina Marga) paparan kajiannya. Besok (hari ini) kita sediakan waktu untuk mereka khusus menjelaskan trotoar saja,” ujarnya.

Selain itu, kata Syarif, alokasi anggaran untuk penataan trotoar seharusnya dicil mengingat adanya anggaran perubahan. Terlebih, saat ini Dinas Bina Marga sedang mengalihkan kabel udara dan utilitas lain ke bawah tanah sehingga trotoar yang sudah bagus digali kembali oleh pemilik utilitas.

“Trotoar yang sudah bagus jangan sampai dibongkar lagi. Bebaskan perbaikan trotoar itu kepada pihak yang bongkar trotoar, misal perusahaan listrik, telekomunikasi, atau lainnya. Bukan malah dialokasikan ke APBD. Kita harus selamatkan uang rakyat,” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan, penganggaran penataan trotoar sebesar Rp1,1 triliun itu cukup janggal sebab anggaran sebesar itu masih untuk alokasi lainnya. “Kebijakan ini menurut kami agak janggal karena uang ini cukup besar, ada warga butuh trotoar untuk jalan iya, apakah selebar itu,” ucapnya.

Diakuinya, banyak anggota DPRD menanyakan fungsi trotoar yang sudah diperbaiki seperti apa ke depannya. Saat ini, kata dia, banyak trotoar dijadikan lahan parkir dan tempat mangkal pedagang kaki lima. “Setelah trotoar dibangun, fungsinya apa sih. Apakah untuk parkir?” tegasnya.